

PENGALAMAN MULTIKULTURALISME DI NEGARA MINORITAS MUSLIM: PRANCIS DAN AMERIKA SERIKAT

Khoirani Febry Dalimunthe¹, Sabarita Br Tarigan¹

¹Pascasarjana Pendidikan Dasar, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
email: khoiranifebry8@gmail.com¹, ittatarigan@gmail.com²

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji pengalaman multikultural yang dialami oleh komunitas Muslim sebagai minoritas di dua negara sekuler: Prancis dan Amerika Serikat. Tujuan artikel ini adalah untuk melakukan analisis komparatif terhadap pengalaman multikultural komunitas Muslim di Prancis dan Amerika Serikat. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, artikel ini menelusuri bagaimana kedua negara mengelola keberagaman agama dan budaya melalui kebijakan serta sikap publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka (library research). Hasil Penelitian ini yaitu di Prancis, Muslim sering menghadapi tekanan untuk berasimilasi yang berdampak pada ketegangan identitas. Sebaliknya, Muslim di Amerika cenderung memiliki ruang yang lebih luas untuk mengekspresikan identitas agama dan budaya mereka. Artikel ini juga menyoroti peran media dan wacana politik dalam membentuk persepsi publik. Ditekankan perlunya pendekatan kebijakan yang inklusif dan dialogis untuk menciptakan koeksistensi yang adil dalam masyarakat yang majemuk. Kesimpulan artikel ini yaitu pengalaman komunitas muslim di negara minoritas muslim sangat dipengaruhi oleh kebijakan negara dan pendekatan ideologis terhadap keberagaman. Prancis dengan prinsip laïcité menerapkan sekularisme yang ketat, sementara Amerika Serikat menganut pluralisme yang lebih terbuka. Perbedaan paradigma ini menciptakan pengalaman sosial, politik, dan budaya yang sangat kontras bagi komunitas muslim sebagai kelompok minoritas.

Kata kunci: Amerika Serikat; Multikulturalisme; Muslim Minoritas; Prancis; Sekularisme.

ABSTRACT

This article examines the multicultural experiences of Muslim communities as minorities in two secular countries: France and the United States. The purpose of this article is to conduct a comparative analysis of the multicultural experiences of Muslim communities in France and the United States. Using a qualitative-descriptive approach, this article explores how the two countries manage religious and cultural diversity through public policies and attitudes. The method used in this study is a descriptive qualitative research method with data collection techniques using library research. The results of this study are that in France, Muslims often face pressure to assimilate which has an impact on identity tensions. In contrast, Muslims in America tend to have a wider space to express their religious and cultural identities. This article also highlights the role of the media and political discourse in shaping public perceptions. It emphasizes the need for an inclusive and dialogical policy approach to create a just coexistence in a pluralistic society. The conclusion of this article is that the experiences of Muslim communities in Muslim-minority countries are heavily influenced by state policies and ideological approaches to diversity. France, with its laïcité principle, implements strict secularism, while the United States embraces a more open pluralism. These different paradigms create very contrasting social, political, and cultural experiences for Muslim communities as a minority group.

Keywords: United States; Multiculturalism; Muslim minorities; France; Secularism.

PENDAHULUAN

Dalam konteks globalisasi yang semakin intensif, isu multikulturalisme menjadi sorotan utama dalam wacana sosial dan politik, terutama di negara-negara dengan tingkat imigrasi yang tinggi. Prancis dan Amerika Serikat, sebagai negara sekuler dengan sejarah panjang sebagai tujuan migrasi, menghadapi tantangan yang kompleks dalam mengakomodasi keberadaan komunitas muslim sebagai kelompok minoritas yang terus berkembang. Meskipun keduanya menjunjung prinsip sekularisme, pendekatan mereka terhadap keberagaman agama dan budaya menunjukkan perbedaan yang cukup tajam dan mendasar. Di Prancis, prinsip *laïcité* diterapkan secara ketat sebagai bentuk pemisahan antara agama dan negara. Kebijakan ini membatasi ekspresi simbol-simbol keagamaan di ruang publik termasuk larangan mengenakan jilbab di sekolah-sekolah negeri (Miranda, 2022). Kebijakan tersebut menimbulkan kontroversi dan perdebatan sengit karena dianggap menghambat kebebasan beragama dan membatasi hak individu dalam mengekspresikan identitas budayanya.

Sementara itu, Amerika Serikat menerapkan pendekatan yang lebih inklusif melalui prinsip pluralisme budaya, yang memberikan kebebasan lebih besar kepada individu untuk mengekspresikan identitas keagamaan dan etnis mereka di ruang publik. Konstitusi Amerika menjamin kebebasan beragama, yang memungkinkan komunitas Muslim mendirikan masjid, lembaga pendidikan Islam, dan organisasi sosial keagamaan tanpa intervensi signifikan dari negara. Namun, sejak serangan 11 September 2001, masyarakat Muslim di Amerika menghadapi gelombang Islamofobia, pengawasan ketat, dan prasangka sosial, meskipun secara hukum mereka tetap memiliki perlindungan konstitusional (Athalarik & Susanto, 2020). Menurut Slobodian (dalam Wafirotn, 2016) merebaknya gerakan anti Islam di Amerika Serikat disebabkan pernyataan Donald Trump sebagai kandidat calon presiden AS yang memenangi pemilu AS dengan mengangkat isu-isu imigrasi dan antiIslam, sehingga pada negara-negara Eropa, elit politik lebih terbuka untuk mengkampanyekan isu yang sama, demi meraup kemenangan. Perbedaan kebijakan dan pendekatan ini memberikan dampak yang berbeda terhadap kehidupan komunitas muslim di kedua negara. Di Prancis, penekanan pada asimilasi sering kali menyebabkan alienasi dan keterpinggiran sosial bagi kelompok Muslim. Sebaliknya, meskipun di Amerika Serikat terdapat tantangan diskriminasi dan stereotip, komunitas Muslim memiliki peluang yang lebih besar untuk mempertahankan dan merayakan identitas mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif terhadap pengalaman multikultural komunitas Muslim di Prancis dan Amerika Serikat. Dengan menggali dinamika sosial, politik, serta kebijakan negara yang memengaruhi kehidupan mereka (Nuridin, 2015). Artikel ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana negara-negara sekuler mengelola keberagaman dalam masyarakat yang multikultural (Setiono, 2022). Dalam artikel ini akan dijelaskan cara untuk memahami bagaimana negara sekuler hidup dalam keberagaman. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, tulisan ini akan menelusuri peran negara, persepsi masyarakat mayoritas, serta strategi komunitas muslim dalam merespons tantangan identitas dan integrasi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bermakna dalam diskusi global mengenai praktik multikulturalisme dan strategi integrasi yang adil bagi minoritas agama di masyarakat sekuler modern

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu metode yang akan memberikan gambaran beberapa kemungkinan jawaban untuk memecahkan masalah aktual (*up to date*) dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasinya, menganalisis, dan menginterpretasikannya. Menurut Kutha (dalam Ansori dkk., 2019) metode deskriptif analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi pengalaman komunitas muslim sebagai minoritas di dua negara sekuler, yakni Prancis dan Amerika Serikat. Pemilihan metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi kehidupan komunitas muslim di kedua negara. Penelitian ini bersifat komparatif, dengan fokus pada perbedaan dan persamaan dalam kebijakan sekularisme, sikap publik terhadap muslim, serta ruang ekspresi identitas keagamaan.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan studi pustaka (*library research*) dimana peneliti mengumpulkan data dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis jurnal-jurnal, buku, artikel dari peneliti terdahulu yang ada hubungannya dengan obyek penelitian serta sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini seperti dokumen resmi pemerintah, serta laporan dari media kredibel. Studi kepustakaan menurut Sugiyono (Ansori dkk., 2019) berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. Data diperoleh dari data yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan studi pustaka lainnya seperti buku, jurnal, artikel, peneliti terdahulu.

Teknik analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi isu-isu utama, seperti diskriminasi, integrasi, dan respons komunitas. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan pengecekan silang konteks sosial-politik yang melatarbelakangi setiap fenomena. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat realitas sosial secara interpretatif dan kontekstual. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap wacana akademik tentang multikulturalisme dan hak minoritas dalam sistem sekuler. Selain itu, penelitian ini juga memberi gambaran tentang tantangan dan peluang integrasi dalam masyarakat majemuk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan temuan utama mengenai pengalaman komunitas muslim sebagai minoritas di Prancis dan Amerika Serikat. Analisis fokus pada bagaimana kebijakan sekularisme dan pluralisme memengaruhi integrasi sosial dan identitas budaya mereka. Pembahasan juga mengkaji dinamika sosial-politik serta respons komunitas muslim terhadap tantangan yang dihadapi di kedua negara. Hasil penelitian disusun ke dalam beberapa sub-tema sebagai berikut:

1. Pengaruh Prinsip Sekularisme dalam Konteks Multikulturalisme di Prancis

Prancis dikenal dengan penerapan prinsip *laïcité* yang ketat sebagai landasan sistem sekulernya. Konsep ini secara resmi memisahkan agama dari urusan negara, dengan tujuan menjaga netralitas publik dan mencegah dominasi agama tertentu dalam ranah sosial-politik. Namun, dalam praktiknya, *laïcité* sering kali diinterpretasikan sebagai pelarangan terhadap simbol-simbol agama dalam ruang publik, termasuk di sekolah negeri, kantor pemerintah, dan fasilitas umum lainnya. Larangan mengenakan hijab atau simbol Islam lainnya di sekolah menjadi salah satu isu yang paling kontroversial. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan luas karena di satu sisi dianggap melindungi prinsip sekularisme, tetapi di sisi lain dianggap mengekang kebebasan beragama dan mengabaikan hak individu untuk mengekspresikan identitas budaya dan agama mereka.

Menurut Marbun dkk, (2024) kebijakan *laïcité* Prancis didasarkan pada prinsip sekularisme dan menekankan bahwa agama harus dipisahkan dari negara di lingkungan publik. Menurut Miranda (2022) termasuk institusi pendidikan negeri dan Undang-undang yang sebagai memperkuat *laïcité* ini pada tahun 1905. Adapun beberapa aspek penting dari kebijakan ini yaitu yang pertama pemisahan agama dengan negara: *Laïcité* menghormati perbedaan antara sistem negara dengan agama, sehingga agama tidak mempengaruhi keputusan politik dan organisasi agama tertentu tidak mempengaruhi negara. Kedua, kebebasan beragama: Republik Perancis melindungi semua orang, termasuk kebebasan untuk beragama dan tidak beragama. Ketiga, Pelaksanaan dan penurunan: Meskipun Prancis menganggap ritual kurban sebagai bagian dari kebebasan beribadah, pemerintah tidak mengatur puasa, shalat lima waktu setiap hari, atau sunat. Keempat, Libur keagamaan: Peraturan Ketenagakerjaan memungkinkan cuti hari raya keagamaan seperti Idul Fitri, tetapi hanya boleh diberikan jika pekerjaan atau kepentingan bisnis tidak terganggu.

Kebijakan ini berdampak langsung pada komunitas muslim yang mayoritas adalah keturunan imigran dari Afrika Utara dan Timur Tengah. Banyak individu merasa didiskriminasi dan mengalami marginalisasi sosial karena dianggap 'tidak berasimilasi'. Stigma sosial ini diperparah oleh narasi publik yang sering mengaitkan Islam dengan radikalisme, yang memperkuat stereotip negatif dan islamofobia. Penelitian sosial menunjukkan bahwa banyak muslim muda di Prancis menghadapi dilema identitas yang kompleks antara mempertahankan identitas agama dan budaya mereka dengan tekanan untuk berasimilasi ke budaya mayoritas Prancis yang sekuler dan homogen.

Selain itu, pada tahun 2021 pemerintah Prancis mengesahkan Undang-Undang Anti-Separatisme yang ditujukan untuk melawan ekstremisme dan memperkuat prinsip *laïcité*. Namun, undang-undang ini dikritik oleh banyak kelompok sebagai upaya yang berlebihan dan diskriminatif terhadap komunitas muslim karena kebijakan ini memperketat kontrol terhadap aktivitas keagamaan dan lembaga islam secara luas. Secara sosial, kebijakan ini memperkuat ketidakpercayaan antara komunitas muslim dan pemerintah, sekaligus meningkatkan rasa terisolasi.

2. Pendekatan Pluralisme dan Tantangan Komunitas Muslim di Amerika Serikat

Berbeda dengan Prancis, Amerika Serikat menggunakan model pluralisme budaya yang lebih terbuka terhadap keberagaman agama dan budaya. Konstitusi Amerika Serikat memberikan jaminan kebebasan beragama yang kuat, memungkinkan komunitas muslim untuk mengekspresikan keyakinan dan budaya mereka secara luas di ruang publik. Hal ini memungkinkan pendirian masjid, sekolah islam, organisasi sosial, dan partisipasi aktif dalam kehidupan politik dan sosial.

Namun, meskipun secara hukum mereka dilindungi, komunitas muslim di Amerika menghadapi tantangan signifikan, terutama setelah peristiwa 11 September 2001. Munculnya sentimen islamofobia yang meluas menyebabkan peningkatan diskriminasi, pengawasan polisi yang ketat, dan kasus kekerasan yang menargetkan muslim. Dalam konteks ini, komunitas muslim harus menavigasi realitas sosial yang kompleks, yang memaksa mereka untuk membangun jaringan solidaritas internal serta melakukan advokasi hak-hak sipil.

Di sisi lain, komunitas muslim di Amerika Serikat juga menunjukkan daya tahan dan adaptasi yang tinggi. Banyak dari mereka terlibat aktif dalam dialog antaragama, advokasi sosial, dan upaya memperbaiki citra islam di mata masyarakat luas. Melalui pendidikan, kegiatan budaya dan politik, mereka berusaha mengukuhkan keberadaan mereka sebagai bagian integral dari masyarakat Amerika yang pluralistik. Kartini (2000) menjelaskan hal ini mencerminkan model integrasi yang tidak menghilangkan identitas, melainkan membangunnya secara positif dalam kerangka multikulturalisme. Dengan sistem ini, Setiap orang punya hak dan kebebasan untuk menjalani agamanya, mengekspresikan budaya nya dan menjadi dirinya sendiri tanpa dipaksa menyerupai kelompok mayoritas.

3. Perbandingan Kebijakan dan Dampaknya terhadap Integrasi Sosial

Perbandingan antara Prancis dan Amerika Serikat menyoroiti bagaimana kebijakan sekularisme dan pluralisme memengaruhi pengalaman hidup komunitas muslim secara berbeda. Di Prancis, penekanan pada *laïcité* yang ketat sering menyebabkan pembatasan ruang ekspresi agama dan budaya yang berdampak pada marginalisasi dan konflik sosial. Kebijakan asimilasi yang dipaksakan juga berkontribusi pada alienasi kelompok minoritas, terutama generasi muda muslim yang merasa terjebak dalam ketegangan identitas.

Sebaliknya, di Amerika Serikat, meskipun islamofobia dan diskriminasi nyata terjadi, kebebasan beragama yang dijamin memberikan ruang lebih besar bagi komunitas muslim untuk mengembangkan identitas mereka secara terbuka. Pendekatan ini memungkinkan interaksi dan dialog yang lebih luas antara komunitas muslim dan masyarakat mayoritas, meskipun tantangan tetap ada (Ramadhani dkk., 2025). Model pluralisme ini juga membuka kesempatan partisipasi sosial-politik, yang penting untuk memperkuat posisi komunitas muslim dalam struktur masyarakat.

4. Dinamika Sosial dan Respon Komunitas Muslim

Di kedua negara, komunitas muslim tidak hanya menjadi objek kebijakan dan persepsi masyarakat mayoritas, tetapi juga agen aktif dalam membentuk pengalaman mereka sendiri (Iribaram, 2018). Di Prancis, misalnya, terdapat berbagai inisiatif komunitas untuk memperjuangkan hak-hak beragama dan menentang diskriminasi melalui organisasi-organisasi masyarakat sipil dan advokasi hukum. Di Amerika Serikat, komunitas muslim mengembangkan jaringan sosial dan politik yang kuat untuk melawan stereotip dan mempromosikan pemahaman lintas agama (Kartini, 2000). Komunitas muslim di Amerika Serikat juga menunjukkan tindakan aktif yang luar biasa. Mereka membuat jaringan sosial yang kuat untuk melawan stereotip buruk seperti anggapan bahwa semua muslim itu ekstremis dan untuk membangun hubungan baik dengan kelompok dan agama budaya lain.

Namun, tantangan yang dihadapi komunitas muslim juga berbeda. Di Prancis, tekanan untuk berasimilasi sering kali menghambat kebebasan ekspresi identitas, sementara di Amerika Serikat walau kebebasan beragama dijamin, islamofobia sosial dan politik tetap menjadi ancaman yang nyata. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan hukum saja tidak cukup; penerimaan sosial dan pengurangan stigma juga krusial untuk integrasi yang berhasil.

5. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Hasil analisis ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara prinsip sekularisme dan penghormatan terhadap kebebasan beragama dan budaya minoritas. Negara-negara sekuler seperti Prancis perlu mengevaluasi ulang kebijakan yang terlalu restriktif agar tidak menciptakan ketegangan sosial yang kontraproduktif. Pendidikan multikultural dan dialog antaragama dapat menjadi alat penting untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi masyarakat mayoritas.

Sementara itu, Amerika Serikat dapat terus memperkuat perlindungan hukum sekaligus melakukan upaya sistematis untuk mengurangi Islamofobia melalui kampanye edukasi dan kebijakan inklusif. Kedua negara dapat belajar dari pengalaman satu sama lain untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya menjaga netralitas negara, tetapi juga mengakui dan menghargai keberagaman identitas warga negara.

Kebijakan sekularisme dan implikasinya di Prancis. Prancis dikenal dengan penerapan prinsip *laïcité* yang sangat ketat, di mana agama secara tegas dipisahkan dari urusan negara dan ruang publik. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga netralitas dan kesetaraan semua warga negara tanpa pengaruh agama, namun dalam praktiknya sering kali berdampak membatasi ekspresi keagamaan terutama bagi komunitas muslim. Larangan memakai hijab dan simbol agama lain di sekolah negeri menjadi simbol kontroversial yang memicu perdebatan tentang kebebasan beragama versus kepentingan sekularisme negara. Kebijakan ini membuat banyak muslim merasa identitas keagamaan mereka ditekan dan sulit untuk mengekspresikan diri secara terbuka. Kondisi ini diperparah dengan narasi negatif yang mengaitkan islam dengan radikalisme dan terorisme, yang memperkuat stereotip dan stigma sosial. Akibatnya, komunitas muslim, khususnya generasi muda, menghadapi tekanan sosial untuk berasimilasi, yang sering berujung pada rasa alienasi dan marginalisasi dalam masyarakat Prancis.

Selain itu, kebijakan anti-separatisme yang diberlakukan pemerintah semakin memperketat kontrol terhadap aktivitas keagamaan muslim, yang memicu kritik dari berbagai pihak karena dianggap diskriminatif dan memperburuk ketegangan

sosial. Dengan demikian, meskipun *laïcité* dimaksudkan untuk melindungi kebebasan dan kesetaraan, penerapan yang terlalu ketat justru menimbulkan ketidakadilan dan memperdalam fragmentasi sosial di antara kelompok minoritas muslim.

Pendekatan pluralisme di Amerika Serikat dan tantangan yang dihadapi berbeda dengan Prancis, Amerika Serikat menganut model pluralisme yang lebih inklusif terhadap keberagaman agama dan budaya. Konstitusi Amerika Serikat menjamin kebebasan beragama secara kuat, sehingga komunitas muslim dapat mengekspresikan keyakinan mereka tanpa pembatasan yang ketat seperti di Prancis. Komunitas muslim di Amerika Serikat mampu mendirikan masjid, sekolah, dan organisasi sosial, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik.

Namun, peristiwa 11 September 2001 mengubah dinamika ini secara signifikan, memicu meningkatnya islamofobia dan pengawasan terhadap komunitas muslim. Muncul stereotip negatif yang melekat pada muslim, dan kasus diskriminasi maupun kekerasan berbasis agama pun terjadi. Meskipun demikian, komunitas muslim di Amerika Serikat menunjukkan ketahanan yang tinggi dengan membangun jaringan sosial, advokasi hak sipil, dan dialog antaragama yang aktif. Upaya ini tidak hanya membantu mereka mempertahankan identitas dan keberadaan mereka, tetapi juga berkontribusi pada penguatan nilai-nilai demokrasi dan multikulturalisme di masyarakat Amerika Serikat yang pluralistik. Dengan demikian, meski menghadapi tekanan sosial, komunitas muslim di Amerika Serikat memiliki ruang yang relatif lebih luas untuk eksistensi dan partisipasi dalam kehidupan publik.

Dampak kebijakan terhadap integrasi dan identitas minoritas yaitu kebijakan yang diambil oleh masing-masing negara sangat berpengaruh pada bagaimana komunitas muslim mengalami proses integrasi dan membangun identitas. Di Prancis, tekanan untuk berasimilasi melalui kebijakan sekularisme yang ketat sering kali menghambat komunitas muslim untuk mengekspresikan identitas religius dan budaya mereka secara bebas. Hal ini berujung pada munculnya perasaan alienasi dan ketidakpuasan, yang dapat memicu ketegangan sosial dan konflik identitas di kalangan minoritas muslim, terutama generasi muda.

Sebaliknya, pendekatan pluralisme di Amerika Serikat memberi ruang yang lebih besar bagi keberagaman identitas sekaligus menjamin perlindungan hukum. Walaupun tekanan sosial berupa islamofobia tetap ada, komunitas muslim di Amerika Serikat lebih mampu mempertahankan dan mengembangkan identitas mereka tanpa kehilangan hak sipil. Perbedaan ini menunjukkan bahwa model kebijakan dan sikap masyarakat mayoritas berperan krusial dalam menentukan kualitas integrasi dan kohesi sosial minoritas muslim. Pendekatan yang terlalu restriktif berisiko memunculkan segregasi dan konflik, sementara inklusivitas cenderung mendukung harmoni dan partisipasi yang konstruktif dalam masyarakat.

Respon dan strategi komunitas muslim baik di Prancis maupun di Amerika Serikat, komunitas muslim bukan hanya pasif menerima kondisi, melainkan juga aktif berupaya menanggapi tantangan yang dihadapi. Di Prancis, banyak organisasi dan kelompok muslim yang melakukan advokasi untuk perlindungan kebebasan beragama, mengorganisir dialog antaragama, serta membangun jaringan solidaritas di dalam komunitas. Mereka juga memanfaatkan jalur hukum untuk menentang diskriminasi dan pembatasan yang dianggap tidak adil.

Di Amerika Serikat, komunitas muslim memanfaatkan kebebasan yang ada untuk berpartisipasi dalam politik, pendidikan, dan aktivitas sosial yang memperkuat posisi mereka dalam masyarakat. Partisipasi dalam dialog lintas agama dan kampanye anti-islamofobia menjadi bagian dari strategi membangun pemahaman dan mengurangi stereotip negatif. Upaya kolektif ini menunjukkan dinamika dan keberagaman pengalaman komunitas muslim yang beradaptasi sesuai konteks masing-masing negara, sekaligus menegaskan pentingnya suara dan peran minoritas dalam memperkaya kehidupan sosial dan politik nasional. Implikasi kebijakan dan prospek multikulturalisme terlihat dari pengalaman multikulturalisme komunitas muslim di Prancis dan Amerika Serikat memberikan pelajaran penting bagi negara-negara sekuler dalam mengelola keberagaman. Kebijakan yang terlalu ketat dan tidak sensitif terhadap hak identitas agama dapat memperparah marginalisasi dan konflik sosial.

Oleh karena itu, negara-negara perlu merumuskan kebijakan yang tidak hanya menegaskan netralitas agama, tetapi juga menghormati kebebasan beragama dan budaya individu. Pendidikan multikultural dan dialog antaragama dapat menjadi alat strategis untuk membangun kesadaran dan toleransi dalam masyarakat luas. Amerika Serikat menunjukkan bahwa pluralisme yang inklusif dapat memperkuat kohesi sosial dan demokrasi, meskipun tantangan tetap ada. Sementara itu, Prancis dihadapkan pada tantangan besar untuk menyeimbangkan sekularisme dengan kebutuhan multikulturalisme di era globalisasi. Dengan demikian, integrasi minoritas agama harus menjadi proses dua arah yang melibatkan pemerintah, masyarakat mayoritas, dan komunitas minoritas itu sendiri dalam kerangka penghormatan dan inklusi.

SIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa Di Prancis, kebijakan sekularisme yang restriktif sering kali membatasi ekspresi keagamaan komunitas muslim dan menimbulkan rasa keterasingan. Pelarangan simbol-simbol agama di ruang publik, seperti larangan mengenakan hijab di sekolah, tidak hanya berdampak pada hak individu tetapi juga memicu ketegangan identitas. Hal ini memperkuat marginalisasi dan memperdalam jurang sosial antara masyarakat mayoritas dan minoritas muslim. Sebaliknya, komunitas muslim di Amerika Serikat memiliki lebih banyak ruang untuk berekspresi dan berpartisipasi dalam kehidupan publik karena jaminan konstitusional terhadap kebebasan beragama. Meski menghadapi

tantangan islamofobia, mereka memiliki peluang untuk membangun institusi sosial, pendidikan, dan keagamaan yang memperkuat identitas dan posisi mereka dalam masyarakat. Ini menunjukkan pentingnya lingkungan yang mendukung untuk integrasi yang positif. Namun, kedua negara tetap menghadapi tantangan dalam membangun masyarakat yang benar-benar inklusif. Prancis perlu meninjau ulang kebijakan sekularismenya agar tidak mengarah pada diskriminasi terselubung, sementara Amerika Serikat perlu terus mengatasi diskriminasi sosial dan stereotip negatif terhadap muslim. Komunitas muslim di kedua negara juga terus menunjukkan ketangguhan melalui advokasi, solidaritas internal, dan keterlibatan sosial-politik yang konstruktif.

Oleh karena itu, pengalaman multikulturalisme di Prancis dan Amerika Serikat memberikan pelajaran penting bahwa integrasi yang adil membutuhkan kombinasi antara perlindungan hukum, penerimaan sosial, dan kebijakan negara yang inklusif. Negara-negara sekuler tidak hanya harus menjaga netralitas agama, tetapi juga aktif menciptakan ruang aman bagi ekspresi identitas beragama. Dalam dunia global yang semakin plural, pendekatan yang adil dan inklusif terhadap minoritas agama seperti komunitas muslim menjadi kunci untuk menjaga harmoni sosial dan memperkuat demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Y. Z., Budiman, I. A., & Nahdi, D. S. (2019). Islam Dan Pendidikan Multikultural. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 5(2), 110–115. <https://doi.org/10.31949/jcp.v5i2.1370>
- Athalarik, F. M., & Susanto, A. (2020). Representasi Multikulturalisme Dalam Sepak Bola Prancis Masa Kini. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 19(1), 12. <https://doi.org/10.32509/wacana.v19i1.980>
- Iribaram, S. (2018). Proses Islamisasi, Perkembangan, Dan Eksistensi Islam Di Perancis. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 10(2), 309–323. <https://doi.org/10.32489/tasamuh.39>
- Kartini, I. (2000). Dinamika Minoritas Muslim di Amerika Serikat. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 20(1), 97–107.
- Marbun, H. K., Safitri, R., Saragih, R., Situmorang, A., Isnaniah, Hadiningrum, S. (2024). Kebijakan Hukum di Eropa Tentang Konsep Sekularisme Atau Laicite di Prancis. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*.2(1).
- Miranda, A. (2022). Pengaruh Kebijakan Laïcité Terhadap Muslim Di Institusi Pendidikan Negeri Prancis Pada Masa Pemerintahan Macron. *Multikultura*, 24(41), 24–41. <https://doi.org/10.7454/multikultura.v1i1.1082>
- Nuridin, M. A. (2015). Kegagalan Politik Multikulturalisme dan Pelembagaan Islamofobia di Negara-Negara Barat. *Ilmu Ushuluddin*, 2(4), 349–358.
- Ramadhani, R., Nafila, K., Maharani, A., & Amalia, A. D. (2025). Analisis islamofobia terhadap integrasi muslim di negara minoritas islam. 02(01), 91–102. <https://doi.org/10.33752/mjsi.v2i01.8225>
- Setiono, Y. A. (2022). Peran Agama dan Pendidikan dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia. *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 19(1), 88–104. <https://riset-iaid.net/index.php/bestari/article/view/1211%0Ahttps://risetiaid.net/index.php/bestari/article/view/1211/775>
- Wafirotn, K. Z. (2016). Dampak Migrasi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga TKI Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 8(1), 15. <https://doi.org/10.24269/ekuilibrium.v8i1.36>